

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis perumusan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perumusan pengaturan pengangkutan batubara dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia bahwa beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki berkaitan dengan pengangkutan batubara tidak menentukan secara jelas dan tegas. Adanya Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Perda Provinsi Sumsel dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara yang melarang menggunakan seluruh jalan umum untuk kegiatan pengangkutan batubara bertentangan dengan norma undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur jalan nasional bukan pemerintah daerah; dan 2) Berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki berkaitan dengan pengangkutan batubara tersebut dan Perda Provinsi Sumsel dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara telah menimbulkan implikasi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan karena tidak dapat menggunakan jalan umum untuk kegiatan pertambangan padahal undang-undang membolehkannya jikapun perda hanya boleh mengatur larangan untuk jalan provinsi akan tetapi melarang seluruh jalan yang ada sehingga bagi pemegang izin usaha pertambangan mengalami kerugian secara ekonomi karena dengan adanya larangan menggunakan jalan umum (wajib menggunakan jalan khusus) dan hanya ada satu jalan khusus milik perusahaan swasta sehingga memberikan peluang kepada pemilik jalan khusus untuk memonopoli yang berakibat pada adanya persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: *Pengaturan, Pengangkutan Batubara.*

COAL TRANSPORT REGULATIONS IN THE PERSPECTIVE OF LEGISLATION IN INDONESIA

ABSTRACT

This research aims 1) to determine and analyze the formulation of coal transportation regulations from the perspective of legislation in Indonesia; and 2) to find out and analyze the legal implications of regulating coal transportation from the perspective of legislation in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method and the approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of the legal materials used in this research was carried out by interpreting, evaluating and assessing all statutory regulations and assessing relevant legal materials. The results of the research show that 1) The formulation of coal transportation regulations from the perspective of legislation in Indonesia means that several laws and regulations relating to coal transportation do not specify clearly and unequivocally. There are provisions in Article 52 paragraphs (1) and (2) of the South Sumatra Province Regional Regulation and Jambi Province Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Coal Transport Regulations in Jambi Province, Governor Regulation Number 18 of 2013 concerning Procedures for Implementing Coal Transport which prohibits the use of all public roads for coal transportation activities contrary to statutory norms which give authority to the central government to regulate national roads, not regional governments; and 2) The implementation of several laws and regulations related to the transportation of coal and the South Sumatra Province Regional Regulation and Jambi Province Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Coal Transportation Regulations in Jambi Province, Governor Regulation Number 18 of 2013 concerning Procedures for Implementing Coal Transportation. This gives rise to legal implications for mining business permit holders because they cannot use public roads for mining activities even though the law allows it. Even if the regional regulation can only regulate prohibitions on provincial roads, it prohibits all existing roads so that mining business permit holders experience economic losses due to there is a prohibition on using public roads (must use special roads) and there is only one special road owned by a private company, thus giving special road owners the opportunity to monopolize which results in unhealthy business competition.

Keywords: Arrangement, Coal Transportation.